

Kamis, 09 Juli 2026

Contact:

Phone: 0435-8521221

Email :bawaslu.gtlo@gmail.com

## Bawaslu Provinsi Gorontalo Bersama KI dan Kominfo Tuntaskan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Publik di Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota



Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam Kegiatan Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tangga 6–8 Juli 2026

**Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** – Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo) Provinsi Gorontalo menuntaskan rangkaian Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 pada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 6–8 Juli 2026, meliputi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato.

# SIARAN PERS



Visitasi tersebut merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo memastikan seluruh satuan kerja terus meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

Tim visitasi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, bersama Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba, Wahyudin Akili, Moh. Fadri Arsyad, dan Lismawy Ibrahim. Turut hadir Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Idris Kunte bersama Anggota Iswan Lihawa, Dedi Idji, dan Kingdom Makulawuzar. Pada beberapa lokasi visitasi juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo Mohamad Trizal Entengo beserta jajaran sebagai bentuk sinergi dalam penguatan keterbukaan informasi publik.

Di setiap lokasi, tim melakukan monitoring terhadap berbagai aspek penyelenggaraan layanan informasi publik, meliputi kelengkapan dokumen PPID, standar pelayanan informasi, sarana dan prasarana pelayanan, media penyebarluasan informasi, hingga fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Setelah proses monitoring, masing-masing Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mempresentasikan program, fasilitas, serta berbagai inovasi pelayanan informasi publik yang telah dikembangkan di daerahnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara dan diskusi antara tim visitasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui tahapan tersebut, tim melakukan pendalaman terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, mekanisme pelayanan informasi, inovasi PPID, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini bukan sekadar proses penilaian, melainkan bagian dari komitmen Bawaslu dalam membangun budaya pelayanan informasi publik yang berkualitas di seluruh jajaran.

"Visitasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pelaksanaan layanan informasi publik di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan sesuai standar. Melalui monitoring, presentasi, dan wawancara, kami ingin melihat secara objektif bagaimana implementasi keterbukaan informasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Idris Usuli.

Idris menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu, Komisi Informasi, dan Kominfo menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan informasi yang semakin baik.

# SIARAN PERS



"Kami mengapresiasi pendampingan yang selama ini diberikan oleh Komisi Informasi serta dukungan dari Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Kami berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun mendatang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo, Mohamad Trizal Entengo, menyampaikan bahwa keterlibatan Kominfo dalam visitasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung badan publik yang semakin informatif.

"Monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk mitigasi agar pelayanan informasi publik terus berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan seperti ini penting untuk melihat berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki sehingga kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dapat terus meningkat. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut dan mendukung Bawaslu Provinsi Gorontalo meraih capaian terbaik di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Idris Kunte, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tidak hanya bertujuan memberikan penilaian, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan bagi badan publik agar terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

"Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong seluruh badan publik, termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kami melihat adanya komitmen yang baik dari jajaran Bawaslu di Provinsi Gorontalo untuk terus berbenah melalui penguatan PPID, inovasi layanan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat. Harapan kami, semangat ini dapat terus dipertahankan sehingga budaya keterbukaan informasi semakin mengakar dan memberikan manfaat nyata bagi publik," ujar Idris Kunte.

Melalui rangkaian Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota semakin memperkuat tata kelola PPID, meningkatkan inovasi pelayanan informasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga akan menjadi dasar pembinaan berkelanjutan guna mewujudkan Bawaslu sebagai badan publik yang semakin informatif.

*Publisher: Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo*